

	<b>News Title :</b> Pemerintah dan Pelaku Usaha Sepakat Indonesia Jadi Acuan Harga CPO Dunia	
	<b>Media Name :</b> agrofarm.co.id	<b>Journalist :</b> -
	<b>Publish Date :</b> 03 March 2023	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
	<b>Resources :</b> Qayuum Amri (Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia ), Dwi Sutoro (Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ), Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) )	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Sawit	<b>Topic :</b> Aturan Izin Ekspor CPO	

**Pemerintah dan Pelaku Usaha Sepakat Indonesia Jadi Acuan Harga CPO Dunia**



Agrofarm.co.id - Pemerintah dan pelaku usaha sepakat membangun rujukan harga CPO di dalam negeri melalui bursa komoditas yang berbasis data transparan. Karena itulah, pemerintah selanjutnya menandatangani sistem perdagangan CPO yang sudah ada seperti KPEPN (PT Khairina Pemasaran Berencana Nusantara) yang sudah memiliki sistem dan bejalan hampir setengah abad lamanya.

- **Sinar Mas Agribusiness and Food Perkenalkan Manfaat Minyak Kelapa Sawit**
- **Maret 2023, 86 CPO USD 74 per Ton dan Pungutan Ekspor USD 16 per Ton**
- **Kementerian-Pela Kamitman PTPN Jadi Rola Model Percepatan PSR**

Pembahasan bursa komoditas CPO ini dibagikan dalam Seminar Buletin Majalah Sawit Indonesia bertema Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia yang diadakan di Jakarta, Kamis (2 Maret 2023). Seminar ini menghadirkan empat pembicara antara lain Didid Noordiatmoko Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian RI, Kahid Wijayanto Direktur Pemasaran dan Pengelolaan Data EPFWS, Dwi Sutoro Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dan Rahmanto Anis Jusoko Direktur PT. Khairina Pemasaran Berencana Nusantara yang dimoderatori oleh Dr. Tugot Sriyung.

Dalam kata sambutannya, Qayuum Amri, Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia mengatakan bahwa untuk pembenahan referensi harga CPO Indonesia melalui bursa sudah bisa digunakan oleh pelaku industri. Tetapi belum dapat terlaksana karena banyaknya hambatan. Karena itulah, undang Kementerian Perdagangan yang diinisiasi Zulkifli Hasan harus didorong semua pihak karena pemirian harga CPO ini sudah dilakukan.

"Selama ini, Indonesia mengambil acuan harga CPO dari Rotterdam. Padahal, produk sawit kita acap kali mendapatkan hambatan dan asuransi negatif dari Uni Eropa. Sekiranya, kita mampu membangun ledakan sawit Indonesia dengan menyetapkan referensi harga CPO sendiri," ujarnya.

Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mengatakan bahwa pengembangan bursa CPO Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dalam negeri. Saat ini, Indonesia masih menggunakan rujukan harga CPO dari Bursa Malaya (MSEX) dan Bursa Komoditas di Belanda. Dengan menggunakan bursa di luar negeri tidak memberikan dampak bagi kestabilan penawaran dan permintaan di dalam negeri.

"Saat ini di Indonesia, belum ada bursa komoditas yang mampu menggunakan tiga fungsi yaitu price discovery (pembentukan harga), price reference (acuan harga) dan hedging (lindung nilai)," ujar Dwi.

Karena itulah, Dwi mengemukakan kepada pemerintah supaya dapat memanfaatkan sistem perdagangan CPO yang sudah ada seperti KPEPN (PT Khairina Pemasaran Berencana Nusantara). Strategi ini menjadi sangat penting untuk Kementerian Perdagangan ingin menarget pasar pembenahan harga acuan CPO pada Juni mendatang.



Dwi menjelaskan bahwa bursa harga CPO yang telah dikenal merupakan tiga fungsi price discovery (pembentukan harga), price reference (acuan harga) dan hedging (lindung nilai), dan sebuah proses yang fair, efisien, transparan, dan terpercaya.

"Gagasan membangun tata niaga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus didukung dan dilakukan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia," ujarnya.

Lahit lanjut Dwi menyimpulkan, bahwa pembenahan tata niaga sawit, setidaknya harus mencakup empat aspek, antara lain aspek kualitas, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan.

"Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya," ungkapnya.

Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatakan bahwa strategi membenahi harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun ledakan industri sawit di dalam negeri. Karena itulah, Bappebti sedang meninjau aturan baru yang akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas. Aturan tersebut masih dipikir dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan domesitik market obligation (DMO) dan ekspor. Lalu, akan dapat pula produk CPO yang wajib ekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.

"Pemas Bappebti membenahi referensi harga komoditas di Indonesia sebagaimana aturan Undang-Undang No 21/2019 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada bentuk membangun price reference (sawit) yang berada di dua bursa yaitu BBI dan ICDC. Itu sudah menjadi harga acuan bagi dunia," ujarnya.

Moment Didid bahwa tujuan dari harga referensi ini adalah merestruktur harga pasar yang transparan dan efisien semua pihak sehingga dapat menjadi rujukan harga.

Rahmanto Anis Jusoko, Direktur PT. Khairina Pemasaran Berencana Nusantara (KPEPN) mengatakan bahwa KPEPN sudah punya persyaratan seluruh bursa yang menggunakan untuk acuan resmi dijadikan sebagai bursa CPO Indonesia dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan bursa yang lain atau membangun bursa yang baru.

Salah satu pertimbangan KPEPN untuk diadopsi acuan harga CPO adalah dengan pemerintah. Pertama, KPEPN mampu menyesuaikan prosedur dan protokol dalam sebuah platform market place yang fair dan efficient, yang mampu memberikan harga harian yang dipublikasi dan kontinyu.

Kedua, harga CPO KPEPN sudah menjadi acuan harga patokan TIS provinsi dan bursa insentif biodiesel solid ini, dijadikan acuan harga oleh Othman, Inoh, Gopi, Bloomberg Intelligence, Anulyon, Kemendag, dan lainnya.

Ketiga data harga KPEPN sudah ada di terapan dan terapan dalam sistem platform media global Bloomberg dan Reuters (refinitiv).

Keempat, bursa harian yang dijalankan di KPEPN sudah dimulai sejak 1968 dan sudah divalidasi oleh EPK RI pada tahun 2007.

Kelima, KPEPN adalah anak perusahaan dari PTPN sehingga bisa menjalankan misi sebagai sebuah perusahaan yang profesional maupun misi untuk keberlanjutan nasional sesuai dengan pemertan.

Sekarang, Bursa CPO KPEPN dijalankan dengan 0 trade sehingga fair, efficient dan transparan dan juga juga memiliki fasilitas tawar tawar di dua platform utama perdagangan CPO yaitu Balcasa dan Dimal.

Kahid Wijayanto Direktur Pemasaran dan Pengelolaan Data EPFWS sepakat dengan adanya acuan harga komoditas CPO Indonesia yang diharapkan dapat dijadikan acuan harga sawit global. Selain itu, Hanga Anis Jusoko yang sudah dilantik dapat menjadi acuan pengambil kebijakan memodifikasi EPFWS dalam meninjau rencana belajar program.

"Harapan kami dengan adanya bursa, menjadikan Indonesia harga acuan dunia. Karena itulah, kita perlu ada data soal ini baik terkait harga, luas perkebunan maupun secara komoditas untuk produksi, konsumsi, dan ekspor," kata Kahid. **Bumelo**